

Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani

Ferdi Gultom

Universitas Negeri Surabaya
ferdi.19029@mhs.unesa.ac.id

Sugeng Harianto

Universitas Negeri Surabaya
sugengharianto@unesa.ac.id

Suggested Citation:

Gultom, Ferdi & Harianto, Sugeng. (2021). Revolusi Hijau Merubah Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Volume 4, Nomor 2: pp 145-154. <https://dx.doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579>

Article's History:

Received November 2020; Revised January 2021; Accepted March 2021.
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

The green revolution is modernization in agriculture. In Indonesia, the green revolution is a government effort to increase economic development and food security. The program implemented since the New Order regime has shifted traditional agriculture to modern agriculture. This makes agriculture no longer based on ecological principles. In the end, the green revolution created dependence that ended in poverty. This article aims to explain the phenomenon of dependency of the farming community in Indonesia. This research uses the literature study research method, where data is obtained through books, journals, news, articles, and other relevant sources. The data were then analyzed and linked to the dependency theory. The results of this study found that the farming community in Indonesia is very dependent on chemical fertilizers. Chemical fertilizers are government-subsidized fertilizers, even though chemical fertilizers can damage the ecosystem. In addition, the scarcity of subsidized fertilizers makes farmers have to buy expensive non-subsidized fertilizers. Therefore, farmers are always in the poor group, thus creating social inequality. In the end, peasants depend on the compassion of their relatives, relatives, peasants, neighbors to survive in the life of the peasants, relatives, fellow farmers, and patrons (landlords and middlemen) just for a day's meal. They often have to give up to make savings, to borrow from rich people or financial institutions such as banks and cooperatives.

Keywords: modernization; rural sociology; social order; dependency theory; mass poverty

Abstrak

Revolusi hijau merupakan modernisasi dalam bidang pertanian. Di Indonesia revolusi hijau merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan. Program yang dijalankan semenjak rezim orde baru telah menggeser pertanian tradisional ke pertanian modern. Hal tersebut membuat pertanian tidak lagi didasari dengan prinsip ekologi. Pada akhirnya revolusi hijau menciptakan ketergantungan yang berujung pada kemiskinan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena ketergantungan masyarakat petani di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka, dimana data didapat melalui buku, jurnal, berita, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang relevan. Data kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori ketergantungan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat petani di Indonesia sangat ketergantungan dengan pupuk kimia. Pupuk kimia sendiri merupakan pupuk subsidi pemerintah, padahal pupuk kimia dapat merusak ekosistem. Selain itu kelangkaan pupuk subsidi membuat para petani harus membeli pupuk nonsubsidi yang mahal. Oleh sebab itu, para petani selalu berada pada golongan miskin, sehingga menciptakan kesenjangan sosial. Pada akhirnya untuk bertahan dihidup masyarakat petani bergantung pada belas kasihan kerabat, saudara, sesama petani, tetangga, hingga patron (tuan tanah dan tengkulak) hanya sekedar untuk makan sehari. Tidak jarang mereka harus merelakan untuk mengambil uang tabungan, hingga meminjam kepada orang kaya atau lembaga keuangan seperti bank dan koperasi.

Kata Kunci: modernisasi; sosiologi pedesaan; tatanan social; teori ketergantungan; kemiskinan massal

PENDAHULUAN

Modernisasi telah membawa perubahan bagi berbagai aspek kehidupan manusia (Zuldin, 2019). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dirancang untuk membantuk berbagai kegiatan manusia. Modernisasi telah merubah tatanan social karena sistem-sistem yang baru telah masuk ke dalam suatu masyarakat. Jika dilihat dari segi teori, sebenarnya modernisasi terjadi akibat dari masuknya sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 sampai abad-19 (Murdiyanto, 2020). Sistem-sistem yang baru tersebut kemudian tersebar ke berbagai negara-negara di Eropa lainnya, Amerika Selatan, Asia, dan Afrika hingga saat ini. Modernisasi mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga banyak bermunculan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membatu pekerjaan manusia. Perubahan yang terjadi telah menggeser tatanan sosial yang tradisional menuju tatanan sosial modern dalam arti teknologis seperti ciri negara-negara barat yang stabil.

Modernisasi bisa menjadi solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat, misalnya kemiskinan (Zuriatina, 2020). Kita tahu bahwa kemiskinan menjadi agenda utama bagi negara-negara di dunia, oleh sebab itu banyak para peneliti berusaha menjawab persoalan itu. Salah satunya untuk menanggulangi kemiskinan di Eropa pada tahun 1766-1834, seorang peneliti bernama Thomas Robert Malthus berhasil menjawab bagaimana mengurangi kemiskinan dan kemlaratan dengan meningkatkan produktifitas pangan melalui gerakan pemakaian bibit unggul (Basmar et al., 2021). Gerakan tersebut biasa kita dengar dengan istilah revolusi hijau. Dengan demikian diharapkan hasil pertanian dapat menanggulangi masalah kemiskinan di negara Eropa saat itu. Setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua berakhir, revolusi hijau terus berkembang, menggunakan berbagai metode-metode. Revolusi hijau kemudia semakin tersebar dan digunakan di berbagai negara berkembang seperti India dan Filipina yang terbukti berhasil untuk meningkatkan hasil pertanian.

Demikian juga di Indonesia, permasalahan kemiskinan di Indonesia selalu menjadi agenda utama (Jamaludin, 2015). Maka dari itu, untuk menanggulangi kemiskinan pemerintah menekankan modernisasi pada sektor pertanian, salah satunya lewat revolusi hijau. Revolusi hijau di Indonesia juga diharapkan mampu meningkatkan produksi dan ketahanan pangan. Revolusi hijau menawarkan berbagai inovasi baru untuk memajukan pertanian di dunia, khususnya negara berkembang seperti Indonesia.

Revolusi hijau masuk ke Indonesia pada masa orde baru dalam program pembangunan pedesaan (Restiyanto & Yusroni, 2006). Program pembangunan berorientasi pada sektor pertanian, dimana cara pertanian telah berubah dari yang tradisional ke pertanian modern. Modernisasi di bidang pertanian ini membawa perubahan besar pada sektor pertanian, baik dari segi peralatan pertanian, maupun sikap dan budaya masyarakat pedesaan. Pertanian modern ini ditandai dengan penggunaan alat-alat pertanian yang sudah termodernisasi, seperti penggunaan bibit unggul, penggunaan irigasi, penggunaan mesin-mesin, penggunaan pupuk maupun penggunaan obat pemberantas hama. Karena telah menggunakan teknologi pertanian modern tersebut, masyarakat pedesaan juga mengalami perubahan dalam kehidupannya, baik sosial dan budayanya. Perubahan pada aspek ekonomi ini akan merubah aspek-aspek di luar ekonomi yang tidak dapat dihindarkan. Seperti yang dijelaskan oleh Soekanto (2017), perubahan dalam satu kemasyarakatan akan mengakibatkan perubahan-perubahan di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Hal tersebut karena adanya proses hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Perubahan-perubahan tersebut tidak semata-mata membawa pada kemajuan, melainkan bisa berarti kemunduran.

Program pembangunan ekonomi pedesaan yang dilakukan pada dasarnya berusaha membangun perekonomian melalui modernisasi pertanian; mengurangi angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Program tersebut yang didasari oleh revolusi hijau nampaknya akan berhasil mencapai target, mengingat secara geografis Indonesia adalah negara yang sangat strategis, terlebih Indonesia adalah negara kepulauan dan menjadi negara agraris. Lahan pertanian di Indonesia cukup luas. Luas daratan Indonesia sekitar 191,09 juta Ha, dan sebesar 95,90 juta ha (50,19%) memiliki potensi untuk digunakan sebagai pertanian. Dan lahan yang tersedia untuk pertanian seluas 34,58 juta ha. Lahan pertanian yang sangat luas tersebut tersebar di 67.439 desa (Ritung, 2015). Penduduk yang tinggal di desa sebagian besar masih memanfaatkan potensi sumberdaya lahan pertanian dengan pekerjaan sebagai petani. Petani adalah penduduk yang memiliki lahan pertanian, sebagai pengelola, dan mendapatkan pengasilan dari lahan pertanian tersebut atau bisanya disebut sebagai tuan tanah. Buruh tani adalah penduduk yang tidak memiliki lahan pertanian, mereka mencari nafkah dengan bekerja menggarap lahan pertanian orang lain atau tuan tanah. Luas tanah dan potensi yang ada bagi petani nampaknya sangat menguntungkan dan menjanjikan. Seharusnya para petani hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Namun pada kenyataannya

kondisi semacam itu masih sulit ditemukan di masyarakat pedesaan, khususnya mereka yang berprofesi sebagai petani.

Program pembangunan ekonomi yang didasarkan pada revolusi hijau tersebut pada akhirnya tidak terbukti membawa kemajuan. Tidak terbukti seperti yang dipraktikkan oleh negara-negara Eropa Barat, Amerika, dan negara berkembang lainnya. Angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di pedesaan juga masih sangat tinggi, dan cenderung statis tidak berubah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat presentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang. Jumlah itu merupakan akumulasi dari penduduk miskin di perkotaan sebesar 11,16 juta orang dan di pedesaan sebesar 15,26 juta orang (BPS, 2020). Pembangunan ekonomi. Selain menciptakan ketergantungan dan kemiskinan bagi petani, revolusi hijau juga menggeser pertanian ekologis yang didasarkan kepada prinsip-prinsip keberlanjutan, yakni keanekaragaman varietas, kekhasan ekologis lokal dan keseimbangan ekosistem. Pertanian yang seimbang dengan hama dan predator, siklus air, siklus hara, kesuburan tanah, seimbang dengan siklus pembenihan, penanaman, pemanenan, dan bertani yang bukan hanya sekedar memelihara pembaharuan ekosistem. Hal ini menciptakan ketidakmandirian para masyarakat petani, sebab mereka sangat bergantung pada pertanian modern. Melihat para petani sangat bergantung pada pupuk kimia, dimana itu akan merusak kesuburan tanah. Belum lagi buruh tani yang harus 'kehilangan pekerjaannya' sebab tuan tanah menggunakan traktor, mesin penggiling, dan peralatan lainnya agar penanaman dan pemanenan lebih cepat.

Bagi teori modernisasi, negara-negara Dunia Ketiga seperti Indonesia, harus mengikuti negara-negara barat, yang merupakan simbol dari kemajuan, agar menjadi negara modern. Namun, pandangan teori ketergantungan menilai justru ide-ide dari negara barat, tidak serta merta membawa kemajuan bagi Indonesia. Masyarakat pedesaan, khususnya di Indonesia justru secara sosial-budaya mengalami perubahan, memiliki ketergantungan yang tinggi. Pada akhirnya, masyarakat petani menjadi kaum yang mengalami penderitaan. Mereka selalu berhadapan resiko-resiko yang datang, baik itu dari alam, hingga kebijakan pemerintah. Sekalipun banyak teknik-teknik yang dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan kegagalan, kerugian dan resiko lainnya, nampaknya para petani akan tetap rawan (Scott, 1981: 39). Pada akhirnya, para petani hanya bisa bergantung pada orang-orang terdekat mereka. Misalnya keluarga, tetangga, bahkan meminta belas kasihan pada pemilik atau tuan tanah.

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut terkait pola ketergantungan masyarakat petani, sehingga merubah aspek sosial-budaya masyarakat petani di Indonesia. Adapun perspektif yang digunakan dalam pengkajian ini, yakni 'Teori Ketergantungan'. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana bentuk ketergantungan masyarakat petani. Riset ini mengungkapkan bahwa program revolusi hijau telah membawa ketergantungan bagi masyarakat petani, sehingga mereka kesulitan untuk maju.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi pustaka (Sugiyono, 2009). Studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan sebagai data primer dan sekundernya (Darmalaksana, 2020). Data dikumpulkan melalui jurnal-jurnal, buku, artikel, web internet, dan berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan perspektif teori ketergantungan yang menggambarkan keterbelakangan pembangunan ekonomi negara Dunia Ketiga yang disebabkan oleh negara maju. Salah satu bentuk keterbelakangan tersebut adalah yang dialami petani desa. Setelah data sudah terkumpul maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data (Mustari & Rahman, 2012). Pengolahan data dan atau pengutipan referensi ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Ketergantungan

Teori Ketergantungan merupakan sebagai bentuk antitesis dari teori modernisasi (Kartono & Nurcholis, 2016). Jika teori modernisasi berasumsi bahwa jika negara Dunia Ketiga ingin maju, maka mereka harus mengikuti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang notabene adalah negara maju. Masalah yang dihadapi oleh negara Dunia Ketiga, sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh pengaruh dari luar. Kemiskinan yang terjadi di negara Dunia Ketiga lebih disebabkan oleh negara maju. Negara maju lebih mengabdikan keuntungan dari negara Dunia Ketiga yang sifatnya eksploitatif. Selama ini negara maju telah menghegemoni kekuasaan dalam masalah

ekonomi, politik, sosial, dan budaya terhadap negara Dunia Ketiga. Menurut Paul Baran (dalam Martono, 2012) menjelaskan beberapa fenomena yang menjelaskan hal tersebut: *Pertama*, pendapatan nasional yang naik tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun hanya segelintir orang saja. *Kedua*, perekonomian tidak lagi berorientasi pada rakyat, baik dari transaksi dan produksinya, dimana untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pasaran luar negeri.

Menurut Yanuar Iqbal (2007), dalam Kemala (2014), kekuatan ekonomi barat telah bekerjasama untuk melestarikan sistem dunia yang membuat negara berkembang tetap terbelakang dan terus bergantung pada negara-negara maju dalam segala hal. Sekalipun dapat maju, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Hasil dari kontak antara negara maju dengan negara berkembang dapat menciptakan keterbelakangan bagi negara berkembang itu sendiri.

Terdapat asumsi teoritis yang dikembangkan oleh teori ketergantungan (Abdoellah & Mulayanto, 2019). *Pertama*, keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum berlaku bagi negara-negara dunia ketiga. *Kedua*, kondisi ketergantungan pada dasarnya diakibatkan oleh faktor luar. Kemiskinan yang terjadi di negara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh kurangnya modal, atau tidak adanya keinginan berprestasi, melainkan disebabkan oleh pengaruh dari luar jangkauan politik ekonomi dalam negeri suatu negara. *Ketiga*, ketergantungan yang terjadi di negara Dunia Ketiga diakibatkan oleh berpindahnya surplus ekonomi dari negara Dunia Ketiga ke negara maju. *Keempat*, situasi ketergantungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global. Berpindahnya nilai surplus ekonomi negara Dunia Ketiga tadi ke negara maju menyebabkan negara Dunia Ketiga menjadi terbelakang. Namun di sisi lain malah mendorong kemajuan negara maju. *Kelima*, keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu hal yang bertolak belakang dengan pembangunan. Pembangunan ekonomi hanya mungkin terjadi jika surplus ekonomi tidak berpindah ke negara maju.

Asumsi lain mengenai teori ketergantungan dikembangkan oleh Andre Gunder Frank. Frank membagi negara di dunia menjadi dua kelompok, yakni negara metropolis maju dan negara satelit terbelakang. Dalam hipoteses ini, secara struktural negara metropolis maju akan berkembang pesat, sedangkan negara satelit terbelakang akan mengalami keterbelakangan (Frank, 1966). Perkembangan yang terjadi di negara satelit hanya semu dan rapuh karena ketergantungan tersebut. Negara satelit hanya akan berkembang dalam sektor ekonomi dan industrinya secara sehat jika mereka memiliki hubungan yang rendah bahkan tidak ada dengan negara metropolis. Dalam analisis Frank menyebutkan lima tesis mengenai teori ketergantungan yaitu: *Pertama*, terdapat kesenjangan pembangunan antara negara pusat dan satelitnya. *Kedua*, negara satelit hanya akan mampu mengembangkan industri dan ekonominya jika hubungan dengan negara pusat melemah. *Ketiga*, negara satelit yang terbelakang dan feodal saat ini merupakan negara yang memiliki kedekatan dengan negara pusat pada masa lalu. Pada akhirnya negara satelit ibaratkan 'sapi perah' bagi negara pusat; yang sangat dibutuhkan sebagai modal industri kapitalis di negara pusat. *Keempat*, kemunculan perkebunan yang besar di negara satelit sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan keuntungan ekonomi negara pusat. Perkebunan yang dirintis oleh negara pusat ini menjadi cikal bakal munculnya industri kapitalis yang sangat besar yang berdampak pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja negara satelit (Purwandari, 2011). *Kelima*, eksploitasi yang menjadi ciri khas kapitalis menyebabkan menurunnya kemampuan produksi pertanian di negara satelit. Ciri pertanian subsistem pada negara terbelakang menjadi hilang dan diganti menjadi pertanian yang kapitalis.

Tesis dari Frank sama halnya dengan Chambers (1993, dalam Usman (2015), dimana pembangunan pedesaan di Indonesia selama ini berjalan dalam bingkai *the blueprint approach* yang ditandai dengan: (1) gagasan pembangunan pedesaan berasal dari pihak luar, terutama pemerintah pusat, bukan dari internal desa, (2) kegiatan pembangunan pedesaan terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah yang sistem birokrasinya cenderung kaku, (3) sumber dana pembangunan pedesaan terutama adalah dari pemerintah pusat, dan kecenderungannya adalah menghabiskan dana dan harus menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang diprogramkan, (4) program-program pembangunan pedesaan diimplementasikan dalam waktu cepat dan daerah yang luas, (5) program-program pembangunan dibakukan dan diintroduksi dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Semua itu menyebabkan ketergantungan pada masyarakat desa, misalnya kehilangan inisiatif dan hanya bergerak jika ada dorongan dari pihak luar desa.

Modernisasi Pertanian Memunculkan Kemiskinan

Modernisasi dalam berbagai bidang menawarkan kemajuan ekonomi bagi negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Modernisasi di Indonesia berorientasi pada pembangunan ekonomi, khususnya di pedesaan. Salah satu bentuk modernisasi dalam bidang pertanian adalah Revolusi Hijau yang dikembangkan oleh Yayasan Ford dan Rockefeller (Mainaki, 2020). Revolusi Hijau menjadi terobosan baru untuk dunia pertanian di seluruh dunia. Revolusi Hijau menjadi jawaban bagi negara berkembang dalam menghadapi masalah pangan. Revolusi Hijau membawa perubahan secara fundamental dalam dunia pertanian. Pemakaian teknologi dalam pertanian menjadi ciri-ciri Revolusi Hijau, misalnya dengan memakai benih unggul, pupuk kimia, pestisida antihama, dan sistem pengairan yang baik (Rinardi et al., 2019). Tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menyejahterahkan masyarakat petani. Di Indonesia sendiri, program Revolusi Hijau dikenal dengan Program Bimbingan Massal.

Program tersebut tidak lepas dengan adanya politik. Politik pangan yang dilakukan memang mewujudkan keberhasilan. Pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1960-an perekonomian mengalami kestabilan, ditandai dengan harga-harga kebutuhan pokok yang sudah pulih. Sejak saat itu, Indonesia mulai mendapatkan dukungan dan bekerjasama dengan negara-negara asing (khususnya Barat) sehingga mampu mencukupi kebutuhan pangan, sekaligus mampu mengatasi inflasi (Sudarsono, n.d.).

Ketahanan pangan tersebut dibangun melalui kebijakan pembangunan pertanian yang dikenal sebagai Program Bimas (Wahyuni & Indraningsih, 2003), kemudian dilanjutkan dengan Inmas. Program Bimas dilaksanakan dengan sistem komando yang sangat ketat dan bersifat sentralis. Program Bimas dibarengi dengan terus bekerjasama dengan perusahaan agribisnis internasional guna memperkuat produksi dan distribusi padi. Kerjasama tersebut dilakukan dalam bentuk import bibit, pupuk, pestisida, serta penyediaan pangan yang relatif stabil bagi daerah perkotaan. Program dan bentuk kerjasama tersebut menandakan Indonesia sudah mulai masuk dalam Revolusi Hijau, seperti halnya negara berkembang lainnya. Revolusi Hijau membawa perubahan yang fundamental bagi tatanan kehidupan masyarakat desa (Saleh, 2020). Perubahan tersebut ditengarai dengan dapat meningkatnya produksi pertanian, namun itu hanya sementara. Banyak negara berkembang harus membayar mahal dari peningkatan produksi itu. Seperti yang dijelaskan oleh Usman (2015), bahwa Revolusi hijau telah menciptakan ploretarisasi petani miskin. Petani yang miskin menjadi lebih miskin dan petani menengah atau tergolong agak kaya juga tidak berdaya.

Sajogyo (1977; dalam Rinardi et al., (2019), menjelaskan bahwa sebenarnya modernisasi pertanian ternyata menyebabkan para petani kaya semakin kaya, dan petani miskin semakin miskin. Petani *gurem* bukan menjadi sejahterah, melainkan hidupnya semakin terbebani. Pembangunan pertanian justru menciptakan kesenjangan sosial di pedesaan. Bentuk kesenjangan tersebut muncul akibat dari bentuk fasilitas dan teknologi yang hanya dapat dimanfaatkan oleh golongan menengah atas di desa yakni mereka yang memiliki lahan yang luas. Mereka mendapatkan pupuk dan obat-obatan bersubsidi, modal usaha dengan bunga yang lunak, serta pelatihan dan bimbingan pertanian. Sedangkan mereka yang berada pada lapisan atau golongan bawah semakin terpuruk (Usman, 2015).

Selain adanya kesenjangan sosial dalam internal desa, program pembangunan menciptakan kerusakan lingkungan dan budaya pertanian. Para petani terikat dengan kebijakan dalam program pembangunan pedesaan tersebut. Petani harus melakukan produktivitas pertanian melalui pupuk dan obat-obatan kimiawi yang merusak lahan pertanian. Budaya pertanian desa yang awalnya didasarkan pada ekologis, mejadi bergeser pada pertanian yang berorientasi pada produktivitas yang cepat dan efisien. Hal tersebut menyebabkan kerusakan lahan pertanian, seperti degradasi dan pencemaran lingkungan. Air sawah bisa tidak sehat, flora dan fauna menjadi terganggu (Muharram, 2020).

Ketergantungan pada Pupuk Kimia

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, revolusi hijau telah menggeser tatanan sosial masyarakat petani. Sistem tradisional yang awalnya menjadi kearifan lokal masyarakat petani, kini harus bergeser karena modernisasi pertanian yang hanya mementingkan target produksi. Sistem pertanian tradisional sangat didasarkan pada ekologi lingkungan, menjaga kesuburan tanah dan ekosistem lainnya. Karena program pembangunan pedesaan yang dilakukan pemerintah, masyarakat petani harus mengikuti kebijakan untuk melakukan produktivitas pertanian menggunakan pupuk dan obat-obat kimiawi, salah satunya pupuk kimia.

Seperti dalam kutipan dari Hamidi (2021), bahwa masyarakat petani di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah masih ketergantungan dengan pupuk urea dan SP36. Pupuk tersebut oleh pemerintah sudah dibatasi

kuotanya, dan keberadaan pupuk SP36 subsidi juga semakin langka. Alasan mengapa para petani tidak menggunakan pupuk alternatif adalah kekhawatiran gagal panen.

Terdapat juga salah satu tokoh penggiat pertanian yang selalu mengkampanyekan penggunaan pupuk alternatif, yakni Purwanto asal Desa Medayu Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Beliau sering diundang oleh para petani untuk *sharing* dan selalu mendapatkan keluhan dari petani. Beliau juga mengungkapkan bahwa pemerintah harus lebih intensif memberikan edukasi kepada para petani, khususnya di Banjarnegara agar tidak ketergantungan terhadap penggunaan pupuk SP36. Baginya pupuk urea dan SP36 sudah menjadi tren bagi para petani Banjarnegara

Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (KP) Kabupaten Banjarnegara, Totok Setya Winarna melalui Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Ervien Indriatmoko mengungkapkan bahwa pupuk kimia pada dasarnya dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Namun, perlu diketahui jika penggunaan pupuk kimia secara berlebih dapat merusak tanah. Ervien juga menyampaikan bahwa penggunaan pupuk urea dan SP36 sudah menjadi tradisi bagi petani dan memiliki korelasi positif meningkatkan hasil pertanian secara cepat. Untuk edukasi Ervien dan pihaknya melalui petugas lapangan selalu memberikan penyuluhan kepada petani untuk menggunakan pupuk organik yang sudah tersedia termasuk pupuk jenis lain, sebagai pupuk alternatif.

Tidak hanya itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, (2018) di Desa Rejosari, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Desa yang memiliki luas lahan pertanian sekitar 13,36 Ha tersebut memiliki beberapa masalah dalam pertanian. Padahal pertanian menjadi pola kehidupan masyarakat Desa Rejosari untuk menambah ekonomi dan sebagai mata pencaharian mereka. Semenjak masuknya program pembangunan pada masa Orde Baru, masyarakat di Desa Rejosari mendapatkan pupuk kimia gratis oleh pemerintah. Saat itu produksi pertanian mulai meningkat dari 10-15 ton menjadi 10-20 ton. Hal tersebut telah merubah pola pertanian dengan memakai pupuk kimia. Semenjak saat itu para petani sangat bergantung pada pupuk kimia; mereka tidak sadar, karena bagi mereka penggunaan pupuk kimia merupakan suatu hal yang bagus untuk menambah perekonomian keluarga petani. Mereka tidak sadar bahwa penggunaan pupuk kimia dapat merusak unsur hara dalam tanah, namun para petani sudah mengarah pada keuntungan ekonomi dan menganggap bahwa program yang didirikan Orde Baru sangat bermanfaat.

Dari tahun 1980-sekarang masyarakat petani Desa Rejosari sangat bergantung pada pupuk kimia untuk kelancaran lahan persawahannya. Dari tahun ke tahun penggunaan pupuk kimia semakin meningkat dan menghilangkan pupuk organik. Pada 5 tahun periode, pupuk tidak diberi secara gratis, melainkan harus membeli penyedia pupuk dan harga ditentukan oleh pemerintah. Meski harga mahal, para petani tetap membeli pupuk kimia. Dari penggunaan pupuk kimia tersebut tanaman semakin berbuah, dari situ para petani mulai menggantungkan pada pupuk kimia. Para petani lebih memilih mengabdikan bensin untuk pergi ke toko, daripada harus bahan pupuk organik di sekitar pekarangan. Mereka rela bolak-balik untuk mengangkut pupuk kimia yang dibelinya.

Dari temuan tersebut bahwa para petani sangat bergantung dengan pupuk kimia secara berlebih. Mereka tidak sadar bahwa pupuk kimia dapat merusak ekosistem sekitar. Orientasi mereka telah dibentuk hanya untuk keuntungan ekonomi saja. Selaras dengan asumsi Andre Gunder Frank bahwa kemunculan perkebunan yang besar di negara satelit sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan peningkatan keuntungan ekonomi negara pusat. Perkebunan yang dirintis oleh negara pusat ini menjadi cikal bakal munculnya industri kapitalis yang sangat besar yang berdampak pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja negara satelit. Baik petani di Desa Rejosari Kabupaten Mojokerto, maupun Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah mengalami ketergantungan yang mengakibatkan eksploitasi pada sumber daya alamnya. Pembelian pupuk kimia hanyalah menguntungkan para pengusaha pupuk kimia dan elit pemerintah saja, tanpa melihat dampak lingkungannya.

Selain itu karena sudah menjadi tren dan tradisi, para petani tidak berani untuk mencoba alternatif lain karena takut gagal panen. Scott (1981), menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan para petani memiliki cara yang agak berbeda dalam menyikapi resiko. Para petani lebih menghindari resiko daripada menginvestasikan penanaman modal. Dalam menyikapi pola-pola inovasi, seperti melakukan investasi pembuatan sumur pompa, mengubah cara bertanam, atau menggunakan bibit unggul. Petani selalu dihadapkan pada resiko yang sekecilpun dapat mempengaruhi kehidupannya. Ketika terjadi krisis pertanian, mungkin para petani akan akan beralih makanan, seperti umbi-umbian, menitipkan anak-anaknya pada kerabatnya atau tetangga, atau bahkan menjual hewan untuk menarik pajak atau ternak, bahkan menjual tanah. Jika krisis mencakup daerah yang luas dan keluarga petani mengalami dua-tiga tahun krisis beturut-turut, maka persoalan tersebut menjadi persoalan hidup dan mati. Hal yang mungkin bisa dilakukan adalah hidup "dari tangan ke mulut". Maka masuk akal jika para petani menanut apa yang disebut Roumasset sebagai prinsip "dahulukan selamat". Para petani berusaha memilih jenis-

jenis bibit dan cara-cara bertanam untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya resiko daripada memaksimalkan penghasilan rata-ratanya. Pola-pola ekonomi semacam itu disebut sebagai ekonomi subsistensi. Dari sekian teknik, para petani hanya akan memilih secara rutin mana yang meminimalkan kemungkinan kegagalan, namun teknik yang paling baik sekalipun, para petani masih berada pada posisi yang rawan.

Kesenjangan Sosial Masyarakat Petani

Kesenjangan sosial dari masyarakat petani dapat dilihat dan diukur melalui kepemilikan lahan pertanian (Rinardi et al., 2019). Rata-rata penduduk pedesaan bermata pencaharian sebagai petani dan pola pertanian yang tradisional (Hutauruk, 2021). Petani tersebut hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha, minimnya modal pertanian, minimnya infrastruktur untuk pertanian, penggunaan alat-alat pertanian tradisional, bibit yang tidak berkualitas, tanah yang kurang subur karena terus dieksploitasi sebagai lahan pertanian tanpa pemupukan yang baik, kemampuan budidaya tanaman yang rendah, rawan terhadap gangguan hama/penyakit serta pemasaran yang tidak jelas dan rentan terhadap permainan harga para tengkulak yang menyebabkan harga jual komoditi pertanian rendah. Hal tersebut kurang dimiliki oleh para petani miskin, sehingga hanya hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Berbeda dengan petani kaya yang memiliki luas tanah lebih dari 0,5 ha, tersediannya fasilitas dan akses, hingga kemampuan sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu tidak heran jika petani kaya selalu mendapatkan keuntungan lebih dan dapat mempertahankan perekonomiannya. Hal tersebut menciptakan kesenjangan sosial bagi masyarakat pedesaan. Penelitian yang dilakukan oleh Rejeki (2016), pada masyarakat petani di Desa Kaligede, Kabupaten Tuban menunjukkan kesenjangan sosial di antara petani. Para petani mengandalkan musim untuk bercocok tanam, namun kehidupan petani kaya dan petani miskin memiliki perbedaan. Ketika musim paceklik petani kaya masih dapat bertahan dengan stok pangan yang ada. Berbeda dengan petani miskin yang sebagian besar hasil panennya dijual untuk menutupi pengeluaran (modal) saat proses cocok tanam. Sisanya disimpan untuk makanan sehari-hari. Hal tersebut disebabkan oleh luas lahan yang berbeda, dimana petani miskin tidak memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga hasil panennya hanya sedikit.

Tidak hanya kepemilikan luas lahan pertanian, akses untuk mendapatkan pupuk juga sangat terbatas. Kartu tani yang seharusnya mempermudah petani untuk mendapatkan pupuk justru membuat pupuk menjadi langka. Para petani dan pedagang pupuk tidak bisa memperjualbelikan pupuk subsidi secara bebas. Seperti yang dikutip dari Purnawati (2020), bahwa petani dan pedagang pupuk mengharapkan agar pembelian pupuk subsidi melalui Kartu Tani dapat secara bebas dibeli petani dimanapun petani menggarap lahan atau tempat tinggal selama berada di Kabupaten Majalengka. Pupuk subsidi harus dibeli sesuai dengan luas areal lahan yang digarap. Selain itu petani harus membeli pupuk sesuai dengan daerahnya masing-masing. Pupuk yang dimaksud adalah pupuk Urea yang adalah pupuk kimia. Ketika kuota pupuk habis, maka petani tidak bisa membeli pupuk subsidi lagi, melainkan harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal. Petani rela membeli pupuk nonsubsidi walaupun harganya lebih mahal, sebab waktu pemupukan sudah tiba. Selain itu, ketika sebagian sawah rusak, petani harus membeli pupuk nonsubsidi untuk tanam ulang, karena jatah pupuk yang digunakan pupuk.

Hal serupa dialami petani di Kabupaten Jombang, dimana pupuk subsidi dibatasi dengan kuota yang sudah ditentukan, sesuai dengan luas lahan yang digarap. Salah satu petani bernama Jumani nekat untuk membeli pupuk nonsubsidi, karena tanaman padinya sudah harus diberi pupuk. Jumani hanya mendapat sekitar empat sak pupuk, sebab lahan garapannya hanya sekitar 0,5 ha. Untuk satu hektar lahan diberi jatah delapan sak pupuk subsidi (Triraharjo, 2020). Karena pupuk sulit didapatkan, Jumani harus menunggu ketersediaan pupuk subsidi langka, maka Jumani rela membeli pupuk nonsubsidi sekalipun harus membayar lebih mahal.

Kesulitan tersebut membuat para petani terus saja berada pada garis kemiskinan. Kerugian para petani membuat mereka harus mengencangkan sabuk sekuat mungkin, karena harus bertahan dalam kondisi yang penuh resiko. Terlebih bagi petani miskin yang hanya memiliki lahan yang sempit, sehingga hasil panennya tidak banyak. Untuk bertahan hidup para petani harus hidup dengan bergantung dengan kerabat dan orang terdekat mereka, bahkan meminjam uang kepada orang kaya. Hal tersebut membuat masyarakat petani mengalami kesenjangan sosial, sebab tidak bisa secara efektif menggarap lahannya. Hanya petani kaya yang mendapatkan akses secara mudah, baik untuk mendapatkan pupuk, pengelolaan lahan pertanian, hingga hasil produksinya.

Ketergantungan Secara Sosial Petani Miskin

Kondisi seperti itu membuat sebagian besar petani hidup di bawah garis kemiskinan, terlebih mereka yang adalah buruh tani. Buruh tani hanya bergantung pada 'belas kasihan' saudara, sesama petani, tetangga, hingga patron (tuan tanah dan tengkulak) hanya sekedar untuk makan sehari. Karena sifat masyarakat pedesaan cenderung gotong-royong, maka tidak jarang para petani di desa sangat bergantung pada orang lain. Mereka

mengandalkan 'tradisi' tolong menolong antar anggota keluarga, atau penduduk setempat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Saheb et al., (2018), bahwa para petani miskin mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan (1) modal sosial *bonding*, yakni bantuan dari saudaranya; (2) modal sosial *bridging*, yakni dengan mengandalkan belaskasihan tentangnya. (3) Organisasi-organisasi seperti PKK di tingkat RT dan RW juga tidak memiliki peran untuk membantu petani miskin mempertahankan kehidupannya. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015), menunjukkan bahwa untuk mempertahankan hidupnya para petani di Kecamatan Made Surabaya mengencangkan sabuk dengan memanfaatkan uang hasil panen untuk proses pertanian selanjutnya. Jika panen gagal, mereka lebih memilih untuk meminjam uang kepada saudara/keluarga, pinjaman bank atau koperasi, hingga rela mengambil tabungan pribadi untuk keperluan sehari-hari.

Semakin miskin ekonomi petani, maka semakin bergantung pada lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Ketergantungan petani hanya membuat petani semakin miskin. Hal ini sesuai dengan teori ketergantungan bahwa ketergantungan negara Dunia Ketiga terhadap negara maju hanya akan membawa kemiskinan di negara Dunia Ketiga. Ketergantungan negara Indonesia dengan program-program negara maju membuat para petani menderita. Pada akhirnya petani juga mengalami ketergantungan dengan program tersebut, sehingga petani terus mengalami kemiskinan. Sedikit saja gelombang resiko menerpa petani, maka akan menjadi persoalan hidup atau mati bagi petani. Untuk mempertahankan hidupnya mereka bergantung pada kerabat, tetangga, bahkan rela meminjam dan menggunakan uang simpanannya. Seperti yang dijelaskan oleh Scott (1981), bahwa para petani lebih menyukai satu sistem sewa atau ketergantungan, dimana tuan tanah/patron melindungi penyewa/klienya terhadap kehancuran dalam tahun-tahun buruk, dan satu birokrasi yang setidaknya memberikan kelonggaran dalam masa-masa tersebut. Orang kaya akan membangun sikap kedermawanan yang lebih besar kepada tetangga dan kerabatnya pada saat berbagai kegiatan. Kedermawanan itu dibayar dengan rasa betetimakasih dan berhutang budi kepada orang kaya tersebut. Kedudukan orang kaya tersebutlah yang membentuk moral masyarakat petani miskin seperti penjelasan di atas.

KESIMPULAN

Revolusi hijau nampaknya tidak dapat memberikan jalan keluar bagi sebagian besar petani, khususnya petani miskin. Ketergantungan akan pupuk kimia dan fasilitas pertanian modern menciptakan kemiskinan bagi petani. Kemiskinan yang terjadi membuat petani harus bertahan hidup dan mengencangkan sabuk sekecil mungkin. Kemiskinan juga menciptakan ketergantungan baru, yakni petani dapat bertahan hidup dengan cara bergantung pada belas kasihan orang lain.

Selain membawa ketergantungan terhadap pupuk kimia, para petani mengalami kesenjangan sosial, dimana peraturan pasca revolusi hijau sangat memberatkan petani untuk bercocok tanam. Pupuk subsidi sulit sekali didapatkan, sebab peraturan yang begitu ketat. Karena kelangkaan pupuk subsidi, baik petani kaya dan petani miskin mau tidak mau harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang berbanding jauh. Masalah juga timbul ketika lahan pertanian rusak dan harus tanam ulang. Hasil panen yang berbeda antara petani kaya dan petani miskin sangat berbeda. Jika petani kaya dapat bertahan dengan pasokan stok pangan, berbeda dengan petani miskin yang hasil panennya sebegitu besar harus dijual untuk menutupi proses penanaman. Petani miskin hanya bertahan dengan sisah hasil panen untuk makan sehari-hari. Kemiskinan juga membuat petani bergantung pada belas kasihan kerabat, saudara, sesama petani, tetangga, hingga patron (tuan tanah dan tengkulak) hanya sekedar untuk makan sehari. Tidak jarang mereka harus merelakan untuk mengambil uang tabungan, hingga meminjam kepada orang kaya atau lembaga keuangan seperti bank dan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S., & Mulayanto, D. (2019). *Isu-Isu Pembangunan: Pengantar Teoritis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Basmar, E., Purba, B., Damanik, D., Banjarnahor, A. R., Sipayung, P. D., Hutabarat, M. L. P., Astuti, A., Hendrawati, E., Lie, D., & Simanjuntak, M. (2021). *Ekonomi Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- BPS. (2020). Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen. *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Frank, A. G. (1966). The development of underdevelopment. *New York*.
- Hamidi, M. (2021). Petani Banjarnegara Masih Ketergantungan Pupuk SP36, Ini Penyebabnya.

- Timesindonesia.Co.Id.* <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/344408/petani-banjarnegara-masih-ketergantungan-pupuk-sp36-ini-penyebabnya>
- Hutauruk, E. H. (2021). Bisakah Petani Tradisional Menjadi Petani Berdasi? *Kompasiana.Com*. <https://www.kompasiana.com/erwinhutauruk/6096ec26d541df67053361d3/bisakah-petani-tradisional-menjadi-petani-berdasi>
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Pustaka Setia.
- Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Jakarta: Pustaka Pelajar*.
- Kemala, N. I. (2014). *Impor Kedelai Transgenik Indonesia Terhadap Amerika Serikat Sebagai Produk Pertanian Ditinjau Dari Teori Ketergantungan*.
- Mainaki, R. (2020). Scenarios of The Future og Technology and International Development (Penerjemah Revi Mainaki). In *Universitas Siliwangi*. The Rockefeller Foundation dan Global Business Network.
- Martono, N. (2012). *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Paskolonial*. Rajawali Press.
- Muharram, S. (2020). Kebijakan “Revolusi Hijau” Paman Birin dalam menjaga kerusakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 49–64.
- Murdiyanto, E. (2020). *Sosiologi perdesaan Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UPN” Veteran
- Mustari, M., & Rahman, M. T. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Laksbang Pressindo.
- Nugraha, H. S. (2015). Strategi Bertahan Hidup Petani di Kelurahan Made Surabaya. *Komunitas*, 4(3), 1–10.
- Purnawati, T. (2020). Penggunaan Kartu Tani, Praktik di Lapangan Menimbulkan Banyak Masalah. *PikiranRakyat.Com*. <https://zonapriangan.pikiran-rakyat.com/seputar-priangan/pr-46679191/penggunaan-kartu-tani-praktik-di-lapangan-menimbulkan-banyak-masalah?page=3>
- Purwandari, H. (2011). Sistem Ekonomi Perkebunan: Persistensi Ketergantungan Negara Dunia Ketiga. *Jurnal AGRISEP Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 10(1), 63–79.
- Rejeki, S. (2016). *Strategi Bertahan Hidup Pada Musim Paceklik (Studi Deskriptif Kehidupan Petani Miskin Di Desa Kaligede Kecamatan Senori Kabupaten Tuban)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Restiyanto, D. T., & Yusroni, N. (2006). Kegagalan Pembangunan Ekonomi Indonesia Akibat Terperangkap Kegagalan Pendekatan Teori Ekonomi Pembangunan. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).
- Rinardi, H., Masrurroh, N. N., Maulany, N. N., & Rochwulaningsih, Y. (2019). Dampak Revolusi Hijau dan Modernisasi Teknologi Pertanian: Studi Kasus Pada Budi Daya Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(2), 125–136.
- Ritung, S. (2015). *Sumber daya lahan pertanian Indonesia: luas, penyebaran, dan potensi ketersediaan*. Indonesian Agency for Agricultural Research and Development Press.
- Saheb, S., Slamet, Y., & Zuber, A. (2018). Peranan Modal Sosial Bagi Petani Miskin Untuk Mempertahankan Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Di Pedesaan Ngawi (Studi Kasus Di Desa Randusongo Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2(1).
- Saleh, A. (2020). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan Pasca Revolusi Hijau. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 71–93.
- Scott, J. C. (1981). Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara. Basari H. In *Penerjemah. LP3ES. Terjemahan dari: The Moral Economy of Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Jakarta.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Puatu Pengantar* (1st ed.). PT PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, S. (n.d.). Revolusi Hijau pada Perubahan Sosial Komunitas Tani (Studi Alat Produksi di Desa Tebongeano, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara). *Walusuji*, 10(1), 47–56.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Triraharjo, M. (2020). Jatah Dibatasi, Petani di Gudo Jombang Sulit Dapatkan Pupuk Subsidi. *Radarjombang.Jawapos.Com*. <https://radarjombang.jawapos.com/read/2020/09/17/214281/jatah-dibatasi-petani-di-gudo-jombang-sulit-dapatkan-pupuk-subsidi>
- Usman, S. (2015). *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial* (Yogyakarta). Pustaka Pelajar.
- Wahyuni, S., & Indraningsih, K. S. (2003). *Dinamika program dan kebijakan peningkatan produksi padi*.
- Yusuf, R. A. (2018). *Pengorganisasian kelompok petani organik dalam upaya mengurangi ketergantungan Pupuk Kimia di Desa Rejosari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Zuldin, M. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian atas Teori Sosial Kontemporer. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(1), 157–183.
- Zuriatina, I. (2020). Pengaruh Pembangunan Kebudayaan terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 3(1), 1–17.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).